

30.12.02  
✓AR  
a



# **ARTI KONSTITUSI DALAM PEMBATASAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA**

Oleh:  
**RETNO SARASWATI, SH**  
**132 049 710**

---

**Makalah disajikan untuk bahan diskusi bulan Maret 1996**  
**Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum**  
**Universitas Diponegoro**

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft : 2173/KI/1F4  
Tgl. : 23-6-1997

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**1996**

## ARTI KONSTITUSI DALAM PEMBATAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

### I. PENDAHULUAN

Jika berbicara tentang pemerintah dalam negara demokrasi modern ini, maka kita tak dapat melepaskan diri dari teori Trias Politika Montesquieu yang telah memisahkan kekuasaan-kekuasaan dalam negara ke dalam Tiga As (tiga Poros) kekuasaan. Berangkat dari ide tentang kebebasan dan hak-hak asasi manusia Montesquieu telah memancang tonggak ketatanegaraan dengan teorinya itu. Untuk demokratisnya suatu negara dalam pemerintahannya maka Montesquieu menggariskan bahwa bagi satu negara kekuasaan harus dipisahkan menjadi tiga, yaitu : kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang) ; kekuasaan eksekutif (pemerintah, pelaksana undang-undang) ; dan kekuasaan yudikatif (peradilan, kehakiman). Teori tersebut rupanya menjadi alternatif terbaik bagi negara-negara demokrasi sehingga diterima sebagai model kerangka penyelenggaraan negara demokrasi (moderen). Cuma saja penafsiran yang timbul atas teori tersebut tidak selalu sama.

Jika dikaitkan dengan Trias Politika dalam arti pemisahan kekuasaan ke dalam Tiga As (Poros), maka tak dapat disangkal bahwa pembentukan negara demokrasi Indonesia amat dipengaruhi oleh ide Trias Politika. Hanya saja kemudian dimodifikasikan dengan kultur yang hidup di Indonesia sehingga poros-poros kekuasaan itu bukan hanya

tiga tetapi ada lima poros kekuasaan yang sejajar dan saling berhubungan, yaitu : Presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA. Kemudian selain kelima poros yang merupakan lembaga tinggi negara itu ada lagi satu lembaga tertinggi yang disebut MPR.

Seperti diketahui bahwa negara manapun di dunia ini mempunyai tujuan tertentu yaitu tujuan negara yang telah dirumuskan dalam konstitusi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka negara yang bersangkutan mempunyai seperangkat alat-alat atau organ-organ. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, lembaga-lembaga negara tersebut haruslah mendasarkan tindakannya secara konstitusional. Artinya sesuai dengan yang telah digariskan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Fungsi Undang-Undang Dasar atau Konstitusi ini dimaksudkan sebagai barometer untuk menjaga adanya kepastian hukum di dalam praktek penyelenggaraan negara.

Seperti halnya dengan negara-negara lain, negara Republik Indonesia juga mempunyai Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebagai konstitusi tertulis UUD 1945 mengandung konsep-konsep dasar dan muatan materi yang mengatur sistem pemerintahan negara, baik mengenai pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang maupun hubungan antar lembaga negara. Oleh karena itu di dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, UUD '45 berfungsi sebagai landasan konstitusional.

## II. PERMASALAHAN

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, maka muncul permasalahan Adakah secara operasional terdapat pembatasan kekuasaan dalam negara ? dan Apakah pembatasan kekuasaan juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ?

## III. PEMBAHASAN

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam tata hukum suatu negara tersimpul satu bagian yang secara khusus mengatur segi keorganisasian negara. Bagian ini disebut Konstitusi. Dalam khasanah Ilmu Hukum Tata Negara kita dapat membedakan pengertian mengenai konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti luas dan dalam arti sempit, serta konstitusi dalam arti formal dan dalam arti material.

Cukup panjang apabila diuraikan satu persatu pengertian mengenai konstitusi, maka dibatasi saja pengertian konstitusi tersebut pada pengertian yuridis, yakni bahwa konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi sistem Pemerintahan negara.

Apabila pengertian yuridis ini kita pakai maka tidak dapat tidak artinya menyamakan konstitusi dengan Undang-undang Dasar. Konstitusi sebagai naskah tertulis (UUD), pada saat ini lebih sesuai dengan paham modern. Untuk pertama kali istilah konstitusi dalam arti demikian dipakai

oleh para perancang Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang dalam pembukaannya membubuhkan kata-kata sebagai berikut : "...we, the people of the United States, ...do ordain and establish this constitution for the United State of Amerika". Sejak saat ini konstitusi diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar yang didalamnya diatur sekurang-kurangnya tiga macam materi muatan yang bersifat pokok yaitu :

1. Jaminan terhadap hak-hak azasi (dan kewajiban-kewajiban azasi) manusia dan warga negara.
2. Susunan Ketatanegaraan yang bersifat mendasar.
3. Pembagian dan pembatasan tugas Ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar. 1)

Sedangkan pendapat pakar konstitusi lainnya, yaitu C.F Strong dalam bukunya yang berjudul "Modern Political Constitutions" menyebutkan bahwa, Konstitusi sebagai kumpulan azas-azas mengatur tiga hal :

1. Kekuasaan pemerintah (dalam arti luas).
2. Hak-hak yang diperintah.
3. Hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah. 2)

Dari ke dua konsep konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi atau kedudukan konstitusi adalah dimaksudkan

---

1) Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 1987, Hal. 1.

2) Sri Soemantri, Ibid, Hal. 2.

untuk membatasi wewenang pemerintah atau penguasa, mengatur jalannya pemerintahan dan menjamin hak-hak rakyat. Dengan demikian konstitusi menjamin Aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuannya dalam bentuk negara.

Berhubung dengan konstitusi di jaman modern tidak hanya memuat aturan hukum, melainkan juga memformulasikan prinsip-prinsip hukum, haluan negara dan patokan kebijaksanaannya, yang kesemuanya mengikat penguasa dalam suatu negara. Sehingga dengan demikian penguasa dalam sesuatu negara tidak berada di atas konstitusi, tetapi adalah sebaliknya, yakni di bawah konstitusi.

Dari sekian jenis kekuasaan yang ada dalam masyarakat suatu negara, maka kekuasaan politik mempunyai arti dan kedudukan strategis. Karena penting dan strategisnya kekuasaan politik, maka kekuasaan itu harus diintergrasikan, dan integrasi kekuasaan politik ini diwujudkan dalam bentuk negara. Pada hakekatnya kelompok atau kekuatan politik yang sedang memegang kekuasaan negara inilah yang membuat keputusan-keputusan atas nama negara dan kemudian melaksanakannya. Oleh karena itu bukan tidak mungkin bahwa kekuatan politik tertentu yang sedang memegang kekuasaan dalam negara dapat menyalahgunakan kekuasaan tersebut.

Sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk disalah gunakan (power tends to corrupt), maka untuk mencegah adanya

kemungkinan menyalahgunakan kekuasaan itulah konstitusi atau Undang-Undang Dasar disusun dan ditetapkan. Dengan perkataan lain konstitusi itu berisi pembatasan kekuasaan dalam negara. Oleh karena itulah konstitusi mengatur kedudukan serta tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara. Pembatasan kekuasaan ini setidaknya-tidaknya meliputi: sejauh mana ruang lingkup kekuasaan, pertanggung jawaban kekuasaan, kontrol kekuasaan, maupun berkenaan dengan periode atau waktu dijalankannya kekuasaan tersebut.

Pada akhir abad ke 19 telah terjadi perubahan yang besar terhadap negara, dalam arti bahwa "Negara penjaga malam" (Nachtwackker staat) ditinggalkan dan menjadi "Negara Kesejahteraan (Welfare State). Dalam negara kesejahteraan ini kedudukan pemerintah (eksekutif) memegang peranan penting dan menentukan. Bahkan C.F. strong dalam bukunya "Modern Political Constitution" menerangkan bahwa pemegang kekuasaan eksekutif (pemerintah) dalam negara modern mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan luas yang kalau diperincikan meliputi kekuasaan : Eksekutif, Administrasi, Legislatif, Militer, Yudikatif, dan Diplomatik. Karena demikian besar dan luasnya kekuasaan pemerintah, maka diperlukan adanya pembatasan lewat pengawasan atau kontrol yang dilakukan oleh Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat. Secara pasti konstitusi harus merumuskan prinsip-prinsip dan mekanisme pembatasan kekuasaan pemerintah, dalam

praktek ketatanegaraan.

Berbicara soal pembatasan kekuasaan, maka tidak bisa lepas kita harus pula berbicara mengenai konsep pembagian kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan dalam negara tidak lepas pula kaitannya dengan teori Montesquieu yang populer dengan sebutan ajaran "Trias Politica". Sebagaimana telah diketahui, inti ajaran Trias Politica ialah adanya pemisahan kekuasaan dalam negara, sehingga dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan negara tidak berada dalam kekuasaan satu tangan.

Menurut konsep Trias Politica tersebut, kekuasaan negara harus dibagi-bagi dan dipisahkan satu sama lain dalam tiga macam kekuasaan, yaitu :

1. Kekuasaan Legislatif
2. Kekuasaan Eksekutif
3. Kekuasaan Yudikatif

Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini maka tidak ada campur tangan antara Organ-organ negara itu dalam operasional kekuasaan masing-masing. Dengan sistem yang demikian maka di dalam ajaran Trias Politica terdapat suasana "Checks and Balances", dimana di dalam hubungan antar lembaga-lembaga negara itu terdapat sikap saling mengawasi, saling menguji, sehingga tidak mungkin masing-masing lembaga negara itu melampaui batas kekuasaan yang telah ditentukan. Dengan demikian akan terdapat perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara tersebut.



Harus diakui bahwa gagasan untuk memisahkan kekuasaan yang berarti pula sebagai upaya pembatasan kekuasaan, merupakan gagasan politik yang cemerlang. Dapat dibayangkan andaikata kekuasaan itu berada dalam satu tangan, bukan tidak mungkin tirani dan kesewenang-wenangan akan timbul dari pihak yang sedang memegang kekuasaan dalam negara. Oleh karena itulah kekuasaan negara itu harus dicegah jangan sampai berada dalam satu tangan.

Undang-Undang Dasar 1945 yang terkenal sebagai suatu naskah yang singkat, apabila kita kaji dengan cermat, ternyata tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaan. Hal ini dapat kita lihat dari organisasi maupun sistem pemerintahan negara. Menurut UUD 1945, antara kekuasaan eksekutif dan legislatif tak dipisahkan, ketentuan ini dapat kita lihat pada pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menggariskan kerjasama antara Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dengan DPR dalam tugas perundang-undangan.

Dari segi organ negara, UUD 1945 tidak hanya mengenal tiga poros kekuasaan, bahkan lima poros kekuasaan, yaitu : DPR, Presiden, MA, BPK dan DPA yang berkedudukan sejajar disamping Lembaga Tertinggi Negara MPR. Sehingga timbul kemungkinan, bahwa suatu organ mempunyai lebih dari satu fungsi.

Begitu juga dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kendatipun dalam pasal tersebut dijelaskan harus bebas dari campur tangan

kekuasaan lain, khususnya kekuasaan eksekutif, namun hal ini juga tidak mutlak. Karena pada kenyataannya UUD 1945 itu sendiri dalam beberapa hal membuat beberapa pembatasan terhadap kekuasaan kehakiman ini. Dalam praktek ketatanegaraan juga kita lihat bahwa kedudukan hakim dalam hal administratif dan finansial ditentukan oleh organ eksekutif, dalam hal ini oleh Menteri Kehakiman. Sedikit tidaknya situasi yang demikian akan menyebabkan kedudukan hakim dipengaruhi oleh organ eksekutif.

Demikian juga hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung maupun lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, tidak terdapat pemisah kekuasaan secara mutlak. Dalam hal ini dapat kita lihat misalnya dalam Ketetapan MPR No. VI/1973 jo. Ketetapan MPR No. III/1978 pasal 11 ayat 2 yang menetapkan :

"Mahkamah Agung dapat memberi pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak diminta, kepada lembaga-lembaga tinggi negara"

Andaikata nasehat atau pertimbangan hukum dari MA itu diterima, maka sebenarnya MA juga mempengaruhi lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Keadaan-keadaan seperti tersebut diatas juga merupakan isyarat bahwa kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak menganut ajaran Trias Politica.

Pendiri Negara Republik Indonesia kiranya cukup menyadari untuk apa UUD ditetapkan. Tidaklah berlebihan



apabila kita mengatakan bahwa UUD'45 dengan sengaja ditetapkan untuk membatasi kekuasaan yang terdapat dalam negara, dan juga sebagai konsekuensi adanya negara.

Dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD'45 dianut sistem pembagian kekuasaan. Hanya saja siapa sebenarnya yang berposisi sebagai pemegang kekuasaan dalam negara sebelum kekuasaan itu dibagi-bagi dan dibatasi.

Untuk mengupas masalah ini ada baiknya apabila kita memperhatikan formulasi pasal 1 ayat (2) UUD'45 yang menegaskan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bertumpu pada acuan pasal 1 ayat (2) UUD'45 ini, maka berarti sumber kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia adalah di tangan rakyat.

Interpretasi dari rumusan "Kedaulatan adalah di tangan rakyat" menunjukkan bahwa dalam sistem UUD'45, kedudukan rakyatlah yang paling top, paling tinggi, berarti berdasarkan formulasi konstitusional tersebut rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia. Oleh karena itu juga sifat pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah demokratis, dengan catatan bahwa demokrasi yang berlaku di negara kita adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dari sini dapat terlihat bahwa unsur-unsur demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah : kerakyatan, perwakilan dan musyawarah. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan pasal 1 ayat (2) UUD'45

menunjukkan dengan jelas bahwa sesungguhnya pemegang seluruh kekuasaan dalam negara Republik Indonesia adalah rakyat yang kemudian diserahkan pelaksanaannya kepada MPR.

Selanjutnya pasal 1 ayat (2) UUD'45 lebih diperjelas di dalam Penjelasan UUD'45 (pada Sistem Pemerintahan Negara No. III), yang menyatakan bahwa Majelis adalah sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Menunjuk penjelasan tersebut dan juga berdasarkan pasal 1 ayat (2) UUD'45, maka dapat disimpulkan bahwa MPR dalam konstelasi kekuasaan negara kedudukannya sangat sentral.

Oleh karena itu pula berdasarkan konsep UUD'45 MPR dapat mendelegasikan atau membagi-bagikan sebagian kekuasaannya kepada organ-organ negara yang lain, misalnya:

1. Kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada Presiden (pasal 4 ayat (1)).
2. Kekuasaan legislatif didelegasikan kepada Presiden dan DPR (pasal 5 ayat (1)).
3. Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada MA (pasal 24 ayat (1)).
4. Kekuasaan Inspektif (pengawasan) didelegasikan kepada BPK dan DPR, DPR sebagai lembaga yang mengawasi di dalam melaksanakan tugas pemerintahan (penjelasan UUD'45) khususnya mengenai pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, BPK harus memberitahukannya kepada DPR (pasal 23 ayat 5). Dengan laporan itu bila perlu DPR bisa meminta Sidang Istimewa MPR.



5. Kekuasaan Konsultatif didelegasikan kepada DPA, pasal 16.

Adanya DPA ini dimaksudkan agar di dalam melaksanakan tugas-tugas dan kekuasaan pemerintahan Negara Presiden dapat berkonsultasi, dapat meminta nasehat kepada DPA.

Mekanisme pendelegasian kekuasaan yang demikian dalam khasanah Ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik dikenal dengan apa yang dinamakan konsep *distribution of power*.

Kendatipun MPR telah mendelegasikan kekuasaannya kepada Lembaga-lembaga Negara seperti tersebut di atas bukan berarti MPR tidak mempunyai kekuasaan lagi. Bagaimanapun kekuasaan itu tetap ada, terbukti MPR masih dapat mengadakan sidang-sidang, khususnya sidang Istimewa. Lagi pula anggota-anggota DPR itu sendiri berdasarkan pasal 2 ayat 1 UUD '45 adalah juga merangkap menjadi anggota MPR. Dengan demikian menurut konsep kekuasaan dalam negara Indonesia sebenarnya DPR itu tidak lain merupakan perpanjangan tangan MPR untuk mengawasi Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari.

Membicarakan pembatasan kekuasaan menurut konsep UUD '45, maka yang pertama-tama harus diketengahkan adalah mengenai pembatasan waktu atau periode kekuasaan itu sendiri. Apabila kita bicara soal pembatasan periode kekuasaan ini maka kita akan memperoleh isyarat adanya mekanisme lima tahunan kekuasaan dalam UUD '45, yang dikenal dalam praktek ketatanegaraan dewasa ini dengan nama "Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahunan". Perlu





ditegaskan disini bahwa fungsi Kepemimpinan Nasional disini diartikan sebagai suatu mekanisme (proses) penyelenggaraan negara, jadi bukan semata-mata dalam arti pemimpin atau fisik.

Pola Kepemimpinan Nasional Lima Tahun ini membentuk suatu kebulatan dengan pembatasan periode waktu Lima Tahun kekuasaan, yang dalam kalender Ketatanegaraan menurut UUD '45 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rakyat mengadakan pemilihan umum membentuk MPR/DPR setiap lima tahun sekali.
2. MPR menetapkan GBHN sebagai pedoman operasional kegiatan kenegaraan untuk jangka waktu lima tahun.
3. MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk periode waktu lima tahun (pasal 7).
4. DPR mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden dalam jangka waktu lima tahun (Penjelasan UUD '45).
5. Presiden memberikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan lima tahun, pada MPR.
6. Rakyat kembali mengadakan pemilihan umum untuk membentuk MPR (Rangkaian kegiatan berulang kembali sebagai realisasi proses periodisasi kekuasaan lima tahun).

Dari mekanisme sebagaimana diuraikan di atas maka ternyata dalam UUD '45 Supra struktur politik desentralisasi pada tiga lembaga negara, yaitu : MPR, DPR, dan Presiden sebagai inti dari sistem pemerintahan Indonesia di bawah UUD 1945.

Namun demikian sebagai konsekuensi logis dari asas "The concentration of power and responsibility upon the Presiden", sebagaimana tercantum dalam penjelasan UUD'45 menunjukkan bahwa sebenarnya kekuasaan eksekutif lebih menonjol yang oleh beberapa pakar Hukum Tata Negara dikatakan dalam UUD'45 adanya "executive heavy". Memang tidak dapat diingkari bahwa dengan tidak menganut ajaran Trias Politica, maka kekuasaan Presiden atau kekuasaan eksekutif sangat menonjol dalam UUD'45 seperti :

- Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR.
- Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR.
- Presiden memegang kekuasaan atas Angkatan Darat, Laut dan Udara (kekuasaan militer).
- Presiden memegang kekuasaan Diplomatik, dan lain sebagainya.

Diakui bahwa kekuasaan Presiden atau kekuasaan eksekutif itu secara konstitusional sangat besar dan luas, tetapi itu tidak berarti kekuasaan tersebut tidak terbatas. Pembuktian tentang adanya pembatasan kekuasaan Presiden dapat kita lihat pada penjelasan UUD'45 tentang Sistem Pemerintahan Negara Angka VII, yang menyatakan "Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas". Sekalipun Kepala Negara menurut penjelasan UUD'45 (Penjelasan Sistem Pemerintahan Negara

Angka V) tidak bertanggung jawab kepada DPR, akan tetapi ia sebagai Mandataris MPR adalah tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Pembatasan kekuasaan Presiden juga dalam hal membentuk Undang-Undang yang harus senantiasa dengan persetujuan DPR (pasal 5 ayat 1 UUD'45). Bahkan khusus dalam hal menetapkan Pendapatan dan Belanja Negara, kedudukan DPR adalah kuat, dari pada kedudukan Pemerintahan sebagai tanda kedaulatan rakyat (penjelasan pasal 23 UUD'45).

Selain itu fungsi pengawasan dari DPR terhadap Presiden, inipun membatasi kekuasaan eksekutif, sebagaimana rumusan penjelasan UUD'45 tentang Sistem Pemerintahan Negara Angka VII bahwa anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau MPR, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggung jawaban kepada Presiden.

#### IV. KESIMPULAN

Untuk mencegah adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, maka konstitusi atau UUD ditetapkan. Indonesia dengan UUD 1945 telah mengatur muatan materi mengenai pembatasan kekuasaan di dalam Negara Republik Indonesia. Selain itu diperlukan adanya pembatasan kekuasaan lewat pengawasan atau kontrol yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat (DPR).

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1985.

BP - 7 Pusat, Undang-Undang Dasar: Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila: Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1990.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Pangeran Jakarta Offset, 1976.

Musanef, Sistem Pemerintahan Di Indonesia, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1983.

Thaib, Dahlan, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, Yogyakarta, 1993.